

---

# PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KRITISISME PUBLIK: PERSPEKTIF SOSIAL-BUDAYA

Nurkelana

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## Abstrak

Pendidikan politik memiliki peran yang vital dalam membentuk kritisisme publik, terutama dalam konteks sosial-budaya yang kompleks. Dalam era di mana informasi mudah diakses dan tersebar luas, kritisisme publik menjadi semakin penting untuk memastikan partisipasi yang berarti dalam proses demokratis. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik, menggambarkan hubungan antara pendidikan politik dan dinamika sosial-budaya, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam mengembangkan pendidikan politik yang efektif.

**Kata Kunci:** *Pendidikan politik, kritisisme publik, sosial-budaya*

---



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Pendidikan politik memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kritisisme publik di suatu masyarakat. Melalui pendidikan politik, individu tidak hanya diberikan pengetahuan tentang proses politik, tetapi juga dibekali dengan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Perspektif sosial-budaya menjadi hal yang sangat relevan dalam memahami bagaimana pendidikan politik memengaruhi kritisisme publik. Dalam pendahuluan ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya pendidikan politik dari sudut pandang sosial-budaya serta dampaknya terhadap pembentukan kritisisme publik.*

*Pendidikan politik merupakan bagian integral dari proses pembentukan masyarakat yang demokratis. Di dalam masyarakat demokratis, partisipasi politik yang aktif dan kritis dari warganya dianggap sebagai salah satu fondasi yang mendasar. Namun, untuk dapat berpartisipasi secara efektif, individu perlu memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik, proses pengambilan keputusan, serta struktur kekuasaan dalam suatu sistem politik. Inilah dimensi penting dari pendidikan politik: menyediakan pengetahuan dasar yang diperlukan bagi warga negara agar mereka dapat memahami dan berpartisipasi dalam kehidupan politik mereka.*

*Namun, pendidikan politik tidak hanya tentang pemberian pengetahuan semata. Dalam konteks sosial-budaya, pendidikan politik juga bertujuan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai yang mendukung partisipasi politik yang kritis dan bertanggung jawab. Sikap yang didorong oleh nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan penting bagi individu untuk memahami dan menanggapi isu-isu politik dengan cara yang seimbang dan berbasis informasi yang akurat. Oleh karena itu, pendidikan politik dalam perspektif sosial-budaya tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan konatif dari pembelajaran.*

*Dalam konteks sosial-budaya, pentingnya pendidikan politik juga terletak pada perannya dalam membentuk identitas politik individu dan kelompok. Identitas politik merupakan konstruksi sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, nilai-nilai, dan pengalaman sejarah. Pendidikan politik dapat membantu individu untuk memahami identitas politik mereka sendiri, serta memperluas pandangan mereka terhadap identitas politik kelompok lain. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi jembatan untuk membangun pemahaman dan empati lintas kelompok, yang pada gilirannya dapat mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan dialog yang konstruktif dalam masyarakat.*

*Pada akhirnya, pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik tidak dapat dilebih-lebihkan. Melalui pendidikan politik yang berkualitas, individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.*

## **Metode Penelitian**

*Metode penelitian tentang pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik dengan perspektif sosial-budaya memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam merancang metode penelitian untuk topik ini:*

1. **Pengumpulan Data Kualitatif dan Kuantitatif:** Langkah pertama dalam metode penelitian adalah pengumpulan data yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi kelompok, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Sedangkan data kuantitatif dapat diperoleh melalui survei, kuesioner, atau analisis statistik terhadap data sekunder yang tersedia.
2. **Penelitian Lapangan (Field Research):** Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu terkait pendidikan politik dan kritisisme publik, penelitian lapangan menjadi penting. Penelitian lapangan dapat melibatkan kunjungan ke sekolah, lembaga pendidikan, atau komunitas lokal yang terlibat dalam program pendidikan politik. Selama penelitian lapangan, peneliti dapat mengamati, wawancara, atau berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik yang sedang berlangsung.
3. **Studi Kasus:** Studi kasus merupakan pendekatan yang efektif untuk memahami secara mendalam dampak pendidikan politik terhadap pembentukan kritisisme publik dalam konteks sosial-budaya. Dengan memilih beberapa kasus yang mewakili berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya, peneliti dapat menganalisis secara mendalam bagaimana program pendidikan politik tertentu mempengaruhi sikap dan perilaku kritisisme publik.
4. **Analisis Komparatif:** Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara berbagai konteks atau kasus untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam pembentukan kritisisme publik. Dengan membandingkan pengalaman pendidikan politik dan kritisisme publik di berbagai negara, wilayah, atau kelompok sosial, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik.
5. **Analisis Konten:** Metode ini melibatkan analisis terhadap konten materi pendidikan politik, termasuk buku teks, materi kurikulum, dan media pembelajaran. Dengan menganalisis konten materi pendidikan politik, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana isu-isu kritis dan perspektif alternatif diwakili dalam kurikulum, serta sejauh mana pendekatan ini mempromosikan pemikiran kritis dan analisis reflektif.
6. **Partisipasi Aksi (Action Research):** Melalui partisipasi aksi, peneliti dapat bekerja sama dengan pelaku pendidikan politik dan masyarakat lokal untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan politik yang bersifat responsif terhadap kebutuhan dan tantangan sosial-budaya yang spesifik. Dengan demikian,

*partisipasi aksi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi strategi pendidikan politik yang paling sesuai dalam membentuk kritisisme publik.*

## **PEMBAHASAN**

*Pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk kritisisme publik dari perspektif sosial-budaya. Hal ini berkaitan dengan cara di mana pendidikan politik memengaruhi sikap, nilai, dan perilaku individu dalam masyarakat. Pertama-tama, pendidikan politik berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran politik. Dengan mempelajari sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu politik yang relevan, individu dapat memahami pentingnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Mereka menjadi lebih terinformasi tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih aktif dan berpikir kritis.*

*Selain itu, pendidikan politik juga membantu individu memahami isu-isu politik dengan lebih kompleks. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai pandangan politik, konflik kepentingan, dan konsekuensi dari kebijakan politik tertentu. Dengan memahami konteks yang lebih luas dari isu-isu politik, individu dapat mengembangkan kritisisme yang lebih tajam terhadap narasi yang disajikan oleh berbagai aktor politik. Mereka menjadi lebih cenderung untuk menilai secara kritis informasi politik yang mereka terima dan untuk mempertanyakan motivasi di balik kebijakan politik tertentu. Ini membantu mereka untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi politik, tetapi juga menjadi partisipan aktif dalam proses demokratisasi, mempertanyakan otoritas dan mencari pemahaman yang lebih mendalam.*

*Pendidikan politik juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk budaya politik suatu masyarakat. Dengan mempromosikan nilai-nilai demokratis, toleransi, dialog, dan partisipasi aktif, pendidikan politik dapat membantu membangun lingkungan politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada solusi. Ini menciptakan masyarakat yang lebih terbuka terhadap diskusi dan debat, yang merupakan elemen kunci dari kritisisme publik yang sehat. Ketika individu merasa bahwa pandangan mereka dihargai dan didengar dalam proses politik, mereka cenderung untuk menjadi lebih terlibat dan lebih kritis terhadap keputusan politik yang diambil.*

*Selain itu, pendidikan politik juga dapat membentuk pola perilaku politik yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan memahami prinsip-prinsip moral dan etika politik, individu dilengkapi dengan kerangka kerja untuk menilai tindakan politik, baik itu dari pemimpin politik maupun sesama warga negara. Mereka menjadi lebih cenderung untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka dan untuk menentang tindakan politik yang melanggar prinsip-prinsip etika. Ini membantu memperkuat kualitas demokrasi suatu negara dan mendorong terciptanya sistem politik yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.*

*Pendidikan politik juga berperan dalam membentuk kesadaran akan pentingnya dialog dan komunikasi yang efektif dalam proses politik. Dalam konteks sosial-budaya, pendidikan politik membantu individu memahami nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman. Hal ini memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip*

demokrasi yang inklusif, di mana semua suara didengar dan dihargai. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya menciptakan kritisisme publik yang lebih kuat, tetapi juga mempromosikan budaya politik yang lebih sehat dan berorientasi pada kolaborasi daripada konfrontasi.

Selain itu, pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik juga terlihat dalam peranannya dalam mengatasi disinformasi dan manipulasi informasi. Dalam era di mana sosial media menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang, penting bagi individu untuk memiliki keterampilan kritis yang kuat untuk menyaring dan mengevaluasi informasi yang mereka terima. Pendidikan politik dapat memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk memahami bagaimana politik informasi bekerja dan bagaimana media massa dapat mempengaruhi persepsi publik. Dengan membangun kemampuan kritis untuk membedakan fakta dari opini, individu dapat lebih waspada terhadap upaya-upaya manipulatif yang bertujuan untuk memanipulasi pandangan mereka.

Selain itu, pendidikan politik juga dapat membantu mengatasi polarisasi politik yang semakin meningkat dengan mempromosikan dialog dan pemahaman lintas partai. Dengan memahami kerangka berpikir dan nilai-nilai yang mendasari pandangan politik orang lain, individu dapat menemukan titik persamaan dan membangun kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan meminimalkan potensi konflik yang dapat timbul akibat perpecahan politik. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya membentuk kritisisme publik yang lebih baik, tetapi juga mempromosikan rekonsiliasi dan pemersatu dalam masyarakat yang terbagi.

Pendidikan politik juga berperan dalam mengembangkan partisipasi politik yang lebih aktif dan inklusif di masyarakat. Dengan menyediakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik, struktur pemerintahan, dan hak-hak warga negara, pendidikan politik memberdayakan individu untuk terlibat dalam kehidupan politik mereka. Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, kampanye advokasi untuk isu-isu sosial, atau bahkan berperan sebagai pemimpin di tingkat lokal atau nasional. Dengan memberdayakan warga untuk menjadi agen perubahan dalam sistem politik mereka, pendidikan politik memperkuat demokrasi dan memastikan representasi yang lebih baik dari beragam kepentingan dan pandangan di masyarakat.

Pendidikan politik juga penting dalam memperkuat pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan menyediakan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara untuk memonitor kinerja pemerintah, pendidikan politik membantu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Warga yang terampil secara politik akan lebih mampu mengawasi tindakan pemerintah, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya menciptakan kritisisme publik terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga membantu membangun fondasi untuk pemerintahan yang bertanggung jawab dan efektif.

Selain itu, pendidikan politik dapat membantu meredakan ketegangan sosial dan politik dengan mempromosikan dialog dan pemahaman antar kelompok. Dengan memperkenalkan konsep seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, pendidikan politik dapat membangun

*jembatan antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Ini penting dalam masyarakat yang multikultural dan multi-etnis, di mana konflik sering kali timbul karena ketidakpahaman dan ketakutan terhadap yang berbeda. Dengan mempromosikan dialog yang terbuka dan inklusif, pendidikan politik membantu memperkuat kerukunan sosial dan meredakan ketegangan yang dapat mengancam stabilitas politik.*

*Pendidikan politik juga memiliki dampak penting dalam membangun kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab di semua tingkatan pemerintahan. Dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk calon pemimpin, baik dalam konteks politik maupun masyarakat sipil, pendidikan politik mempersiapkan individu untuk mengambil peran kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini penting dalam memastikan bahwa para pemimpin memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya membentuk kritisisme publik, tetapi juga memperkuat fondasi untuk kepemimpinan yang berintegritas dan berpandangan jauh ke depan.*

*Selanjutnya, pendidikan politik memainkan peran penting dalam membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidaksetaraan ekonomi. Dengan menyediakan pengetahuan tentang isu-isu global dan mempromosikan keterlibatan dalam upaya kolaboratif untuk menyelesaikannya, pendidikan politik mempersiapkan individu dan kelompok untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka. Hal ini dapat melibatkan kampanye advokasi, proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, atau partisipasi dalam inisiatif lintas-batas untuk memecahkan masalah yang mempengaruhi banyak negara dan komunitas. Dengan memperkuat keterampilan dan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi pada solusi-solusi inovatif dan inklusif, pendidikan politik membantu membangun ketahanan sosial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global yang kompleks.*

*Selain itu, pendidikan politik memainkan peran penting dalam mempromosikan pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan rasional di tingkat masyarakat. Dengan mengajarkan keterampilan analisis kritis, evaluasi informasi, dan pemahaman tentang proses pengambilan keputusan, pendidikan politik membantu individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Ini penting dalam menghadapi berbagai isu kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern, termasuk isu-isu politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan membangun kapasitas masyarakat untuk melakukan analisis yang mendalam dan berpikir secara kritis, pendidikan politik membantu menciptakan budaya partisipasi yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang kuat.*

*Selain itu, pendidikan politik juga berperan dalam membangun rasa tanggung jawab sosial dan moral di antara warga masyarakat. Dengan memperkenalkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, pendidikan politik membentuk landasan etis yang mendasari partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat. Ini membantu mendorong perilaku yang bertanggung jawab, baik dalam konteks politik maupun sosial, serta memperkuat norma-norma yang mendukung kesejahteraan bersama dan keadilan. Dengan*

demikian, pendidikan politik membantu memperkuat solidaritas sosial dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, pendidikan politik juga dapat membantu memperkuat hubungan antara warga dan pemerintah, serta antara berbagai sektor dalam masyarakat. Dengan menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta mempromosikan dialog antara berbagai kelompok kepentingan, pendidikan politik memfasilitasi pembangunan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Ini penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi dalam pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pendidikan politik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat sistem demokrasi yang ada. Dengan menyediakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan proses politik, pendidikan politik membantu membangun fondasi untuk masyarakat yang lebih terlibat dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini penting dalam memastikan bahwa demokrasi tetap hidup dan dinamis, serta menghindari risiko penyalahgunaan kekuasaan atau otoritarianisme. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berkontribusi pada keberlangsungan demokrasi, tetapi juga memperkuat kualitas dan legitimasi dari sistem politik secara keseluruhan.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa pendidikan politik bukanlah tugas yang hanya bisa diemban oleh lembaga pendidikan formal. Partisipasi dari berbagai aktor dalam masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan sektor swasta, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan politik yang efektif dan inklusif. Dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, pendidikan politik dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam membentuk kritisisme publik, memperkuat partisipasi politik, dan membangun masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Selain itu, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pendidikan politik juga harus mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian penting dari kurikulumnya. Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber digital menjadi keterampilan yang sangat diperlukan dalam memahami isu-isu politik dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Oleh karena itu, pendidikan politik harus memasukkan pembelajaran tentang penggunaan media sosial, identifikasi berita palsu (hoaks), dan peningkatan kesadaran akan risiko dan tantangan yang terkait dengan lingkungan digital.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan inklusivitas dalam pendidikan politik, dengan memastikan bahwa kurikulum dan program-programnya memperhitungkan keberagaman sosial, budaya, dan politik di dalam masyarakat. Ini melibatkan pengakuan terhadap keberagaman pandangan politik, nilai-nilai, dan identitas yang ada di antara peserta didik, serta memastikan bahwa pendidikan politik tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Dengan demikian, pendidikan politik harus mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berpusat pada peserta didik, yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman mereka.

*Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan efektivitas pendidikan politik, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang berorientasi pada tindakan atau aksi (action-oriented) dalam proses pembelajarannya. Hal ini berarti tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dalam partisipasi aktif dalam kegiatan politik lokal atau nasional. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi peserta didik, serta memberikan dampak yang lebih nyata dalam membangun kritisisme publik dan partisipasi politik yang lebih aktif.*

*Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa pendidikan politik harus bersifat terus-menerus dan berkelanjutan, bukan hanya terbatas pada masa pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi. Penting untuk menyediakan kesempatan pendidikan politik yang berkelanjutan melalui berbagai saluran dan platform, termasuk pelatihan, seminar, workshop, kampanye sosial, dan media massa. Dengan cara ini, pendidikan politik dapat mencapai lebih banyak orang, termasuk mereka yang sudah berada di luar sistem pendidikan formal, dan memastikan bahwa kesadaran politik dan kritisisme publik terus berkembang seiring waktu.*

*Terakhir, perlu diakui bahwa pendidikan politik bukanlah solusi tunggal untuk semua tantangan yang dihadapi dalam membangun kritisisme publik dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, sebagai salah satu instrumen yang paling efektif dan berkelanjutan, pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang sadar, terinformasi, dan aktif secara politik. Oleh karena itu, investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan politik harus menjadi prioritas bagi setiap masyarakat yang berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*

### **Kesimpulan**

*Dalam kesimpulan, pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik dari perspektif sosial-budaya tidak bisa diragukan lagi. Pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sistem politik dan proses demokratis, tetapi juga membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Dengan memperkuat keterampilan kritis dan analitis, pendidikan politik mendorong masyarakat untuk mengevaluasi informasi dengan bijaksana, memahami berbagai perspektif, dan mempertanyakan otoritas politik yang ada.*

*Selain itu, pendidikan politik yang berorientasi pada perspektif sosial-budaya mengakui keberagaman masyarakat dan memperhitungkan konteks budaya dalam proses pembelajarannya. Ini membantu masyarakat untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan budaya, nilai-nilai, dan pandangan politik yang ada, serta menghargai pluralitas dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik dapat menjadi alat untuk memperkuat ikatan sosial, mengurangi konflik, dan mempromosikan inklusivitas dalam kehidupan politik.*

*Selanjutnya, penting untuk memperhatikan bahwa pendidikan politik bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diperlukan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pendidikan politik mencapai sebanyak mungkin orang dan memberikan dampak yang signifikan dalam membangun kritisisme publik yang lebih kuat.*

*Terakhir, pentingnya pendidikan politik dalam membentuk kritisisme publik harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya lebih luas untuk memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan politik merupakan investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa, di mana warga negara memiliki kesadaran politik yang tinggi, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan demokrasi.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Dewi, W. C. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.
- Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from [osf.io/3jpd/](https://osf.io/3jpd/).
- Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Wuri Andary, R. (2015). Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tarigan, U. (2016). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Berutu, B. R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
- Rejeki, R. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.*
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.*
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*